

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pendapatan

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Pendapatan merupakan hasil dari sebuah pekerjaan baik itu berupa usaha maupun sejenisnya. Pendapatan ialah sejumlah uang yang didapatkan oleh individu, rumah tangga atau perusahaan dalam periode tertentu sebagai hasil dari aktivitas ekonomi, seperti pekerjaan, investasi, atau penjualan barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi, pendapatan menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi tingkat konsumsi, tabungan serta keputusan investasi. Didalam ilmu ekonomi, pendapatan merupakan hasil yang diterima oleh individu, rumah tangga atau negara sebagai imbalan atas kontribusi faktor-faktor seperti modal, investasi dan tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. pendapatan juga mencerminkan kemampuan ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa, serta menjadi indikator utama dalam mengukur kesejahteraan ekonomi.

Menurut Rusmijati & Si, (2017), teori ekonomi tersusun dari prinsip-prinsip yang saling berkaitan, dibentuk melalui berbagai model ekonomi. Setiap prinsip atau hukum ekonomi memberikan penjelasan umum mengenai perilaku dan kejadian yang melibatkan sekelompok elemen dalam satu konsep tertentu. Elemen-elemen utama dalam kegiatan ekonomi meliputi kebutuhan manusia, sumber daya yang tersedia, serta metode atau teknik produksi yang digunakan. Sementara itu, ekonomi mikro merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang fokus pada analisis perilaku individu seperti konsumen dan produsen, serta bagaimana harga dan jumlah barang maupun jasa ditentukan di pasar.

Menurut Sadano Sukirno dalam Arifini (2013) mengungkapkan didalam teori ekonomi mikro bahwa pendapatan adalah perolehan yang berasal dari biaya-biaya faktor produksi atau jasa-jasa produktif. Defenisi tersebut menunjukan bahwa

pendapatan adalah seluruh perolehan baik yang berasal dari faktor produksi maupun total output yang dihasilkan untuk seluruh produksi dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan ialah seluruh bentuk imbalan yang diterima dalam bentuk kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik untuk konsumsi, tabungan atau investasi. Konsep pendapatan ini sangat penting dalam ekonomi, karena menggambarkan daya beli dan kemampuan untuk memproduksi atau mengonsumsi barang atau jasa. Pendapatan juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi, distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan ialah jumlah penerimaan yang diperoleh individu, rumah tangga, atau pelaku usaha dari hasil kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Dalam ilmu ekonomi, pendapatan didefinisikan sebagai nilai yang mencerminkan peningkatan kekayaan perusahaan yang terjadi selama suatu periode, tanpa mempertimbangkan perubahan total kekayaan awal. Fokus utamanya adalah pada nilai kekayaan pada akhir periode yang bersifat statis. Artinya, pendapatan mencerminkan penambahan aset yang tidak berasal dari perubahan dalam modal atau kewajiban.

Pendapatan dapat diartikan dengan hasil imbal balik yang didapatkan oleh individu atas jasa dan tenaga yang telah dicurahkan dalam proses menghasilkan suatu produk, jasa, atau layanan tertentu, pendapatan (Sukirno, 2002) yakni sesuatu yang didapatkan dari jumlah barang atau produk yang dihasilkan lalu dihubungkan dengan harga jualnya atau secara matematis dinyatakan melalui persamaan berikut:

$$TR = Q \times P$$

Keterangan :

TR: Total Revenue (pendapatan kotor total)

P: Price/harga

Q: Quantity/Jumlah barang

Dalam ilmu pemerintahan pendapatan dapat didefinisikan dengan beberapa klasifikasi sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dapat diartikan sebagai hak finansial yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang tercatat sebagai penambah aset bersih daerah tersebut. Salah satu sumber utama pendapatan ini dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan utama dari PAD adalah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kapasitas dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayahnya. Dengan demikian, PAD menjadi instrumen penting dalam mendukung kemandirian fiskal dan pengelolaan pembangunan daerah. Kenaikan pendapatan asli daerah menjadi satu diantara faktor penting didalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan di tingkat daerah. Pendapatan ini mencerminkan kemampuan fiskal suatu daerah didalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, termasuk pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan pembangunan. Rasio PAD yang tinggi terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan bahwasanya daerah tersebut telah memenuhi pembiayaan pembangunan secara mandiri. Mengacu pada Pasal 285 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah diklasifikasikan ke dalam struktur sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah bentuk pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan di tingkat lokal. Pajak ini berguna untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah masing-masing. Secara garis besar, pajak daerah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022, terdapat berbagai jenis pajak yang masuk dalam kelompok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi fiskal daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi secara efektif:

i. Pajak Provinsi

Beragam jenis pajak yang masuk kedalam kewenangan pemerintah provinsi dapat dirinci seperti dibawah ini:

➤ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendaraan bermotor dapat dibayarkan pajaknya melalui fasilitas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang disediakan di masing-masing daerah.

➤ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan setiap kali terjadi pengalihan kepemilikan atas kendaraan bermotor. Proses pengalihan tersebut wajib dilaporkan/diajukan secara tertulis pada pejabat atau gubernur yang berwenang dengan tenggang waktu maksimal 30 hari. Pada pengalihan pertama, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan sebesar 20%, sementara untuk pengalihan selanjutnya, tarif pajak daerah yang diberlakukan adalah 1%.

➤ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diberikan kepada pihak penyedia bahan bakar, baik yang berbentuk cair ataupun gas. Besaran tarif pajak daerah untuk PBBKB ini maksimal mencapai 10%.

➤ Pajak yang dikenakan atas pengambilan dan penggunaan air tanah

Pajak Air tanah dibebankan kepada individu atau entitas yang memanfaatkan air permukaan. Namun, penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dasar, irigasi pertanian, dan perikanan rakyat dibebaskan dari pemungutan pajak.

➤ Pajak Rokok

Pajak ini dikenakan pada penjualan rokok dengan tarif sebesar 10% dari nilai cukai rokok. Penerimaan pajak disetorkan ke pemerintah provinsi, dan sebagian dialokasikan untuk mendukung program di bidang kesehatan.

➤ Pajak Alat Berat

Pajak Alat Berat, disingkat PAB, merupakan pungutan atas kepemilikan atau penguasaan terhadap alat berat.

ii. Pajak Kabupaten

➤ Pajak bumi dan bangunan yang berlaku di wilayah pedesaan dan kota (PBB-P2).

PBB-P2 merupakan pajak yang dibebankan pada bangunan atau tanah yang digunakan/dikuasai oleh individu maupun badan hukum.

➤ Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP merupakan nilai rata-rata yang didapat dari transaksi jual beli yang dilakukan secara adil dan wajar. Apabila tidak ada transaksi jual beli, NJOP ditetapkan dengan membandingkan harga dengan objek serupa, nilai perolehan terbaru, atau menggunakan NJOP pengganti.

➤ Pajak atas transaksi kepemilikan baru terhadap tanah dan bangunan (BPHTB)

BPHTB ialah suatu kejadian hukum yang menimbulkan penerimaan hak atas bangunan/tanah oleh individu maupun badan hukum.

➤ Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

PBJT ialah pungutan yang dibebankan kepada konsumen akhir atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan kepada mereka.

➤ Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dibebankan terkait fasilitas penyediaan layanan makanan/minuman yang disajikan kepada konsumen di tempat usaha tersebut.

➤ Pajak Perhotelan

Pajak Perhotelan berlaku atas penyediaan tempat menginap yang mungkin juga mencakup layanan makanan, minuman, hiburan, dan fasilitas penunjang lainnya.

➤ Pajak Reklame

Pajak Reklame ialah pajak yang dibebankan pada pihak yang menyelenggarakan reklame.

➤ Pajak atas komoditas mineral non-logam dan batuan (MBLB)

MBLB merupakan jenis pungutan yang diterapkan terhadap aktivitas pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari sumber daya alam, baik yang terdapat di permukaan maupun di dalam bumi, untuk dimanfaatkan.

➤ Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

➤ Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan pungutan atas penggunaan dan pengambilan air yang diperoleh dari dalam tanah.

➤ Pajak Hiburan

➤ Pajak Penerangan Jalan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan sebagai kompensasi atas pemanfaatan jasa atau perizinan tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bagi individu maupun lembaga. Terdapat beberapa kategori retribusi daerah, antara lain:

I. Retribusi Jasa Umum

- ✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- ✓ Retribusi Pelayanan Persampahan;
- ✓ Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil;
- ✓ Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- ✓ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- ✓ Retribusi Pelayanan Pasar;
- ✓ Retribusi Pelayanan Air Bersih;
- ✓ Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- ✓ Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- ✓ Retribusi Pelayanan Pengujian Kapal Perikanan;

II. Retribusi Jasa Usaha

- ✓ Retribusi Sewa Gedung dan Fasilitas Milik Pemerintah Daerah;
- ✓ Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan;
- ✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, seperti Alat Berat atau Gedung;
- ✓ Retribusi Terminal;
- ✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- ✓ Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
- ✓ Retribusi Rumah Potong Hewan;
- ✓ Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- ✓ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- ✓ Retribusi Penyeberangan Air;

III. Retribusi Perizinan Tertentu

- ✓ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- ✓ Retribusi Izin Trayek untuk Kendaraan Umum;
- ✓ Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- ✓ Retribusi Izin Gangguan (HO);

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari aset milik pemerintah daerah yang tidak lagi tercampur dalam anggaran daerah, melainkan dikelola secara terpisah dan mandiri. Di sisi lain, Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan mengacu pada aset negara yang dikeluarkan dari APBN dan dijadikan penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengelolaan dan pengawasan atas aset tersebut kemudian tidak mengikuti mekanisme APBN, tetapi dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola korporasi yang baik.

4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah lainnya yang dipisahkan merupakan salah satu sumber pemasukan daerah yang bersumber dari laba atau dividen yang diterima pemerintah daerah atas penyertaan modalnya pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan lainnya.

✓ Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer mencakup transfer dari pemerintah pusat maupun daerah yang terdiri dari dana otonomi khusus, dana perimbangan, dana keistimewaan, dan dana desa

✓ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain – lain PAD yang sah, mencakup :

- ✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- ✓ Hasil Pemamfaatan atau Pendayagunaan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
- ✓ Jasa Giro;
- ✓ Pendapatan Bunga;
- ✓ Tuntutan Ganti Rugi;
- ✓ Kuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
- ✓ Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang jasa oleh daerah ;

Mengacu pada ketentuan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas sejumlah unsur, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Pemerintah daerah memiliki hak untuk memperoleh sumber pembiayaan yang mencakup jaminan ketersediaan dana dari pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan, otoritas untuk menetapkan dan memungut pajak serta retribusi daerah, dan juga hak atas bagian dari pendapatan yang berasal dari sumber daya alam serta dana perimbangan. Di samping itu, pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam mengelola aset daerah dan memperoleh sumber pendapatan legal lainnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah mendorong setiap daerah untuk lebih aktif menggali potensi sumber keuangan lokalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari kebijakan otonomi, yakni mempercepat pembangunan dan meningkatkan kemajuan di wilayah masing-masing.

Berdasarkan pendapat dari Sofyan Ansuri didalam bukunya yang berjudul Strategic Management Sustainable Competitive Advantages, strategi dapat dimaknai dengan sebuah sasaran yang ingin diraih, sekaligus sebagai cara untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan, siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana pelaksanaannya, serta kepada siapa informasi tersebut disampaikan. Di samping itu, penting juga untuk memahami alasan perlunya evaluasi terhadap hasil kinerja tersebut.

Minimnya upaya yang maksimal dalam menjalankan program intensifikasi serta ekstensifikasi oleh pemerintah daerah menjadi satu diantara alasan rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah. Guna mengatasi hal tersebut, sejumlah strategi yang bisa diterapkan meliputi;

- Menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan LSM dalam pengelolaan serta pemungutan pajak daerah;
- Melaksanakan pembenahan terhadap sistem manajemen pengelolaan pajak daerah agar lebih efisien dan transparan;
- Memperluas basis pajak (tax-base) untuk mengoptimalkan potensi

penerimaan daerah;

- Mengidentifikasi kembali misi dan mandat organisasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan;
- Menerapkan sistem komputerisasi dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah guna meningkatkan akurasi dan efisiensi;

b. Pendapatan Pemerintah Pusat

Pendapatan Pemerintah Pusat ialah pendapatan yang diterima oleh pemerintah melalui berbagai sumber resmi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

i. Pajak

- ✓ Pajak Penghasilan (PPh);
- ✓ Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- ✓ Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
- ✓ Bea Materai;
- ✓ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- ✓ Bea Masuk dan Pajak Ekspor;
- ✓ Pajak Karbon;
- ✓ Pajak cukai;

ii. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Penerimaan dari sumber daya alam, seperti gas alam, pertambangan, perikanan serta minyak bumi;
- Bagian laba BUMN dan BUMD;
- Penerimaan deviden;
- Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, seperti jasa kepelabuhan, kebandarudaraan, tenaga listrik dan pendidikan.;
- Penerimaan negara berdasar pada putusan pengadilan dan bersumber dari pengenaan denda administrasi;
- Penerimaan dari hasil penjualan barang/kekayaan negara;

- Penerimaan jasa giro;
- Penerimaan dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah;

iii. Hibah

- Penerimaan bantuan yang tidak perlu untuk dikembalikan pada pemilik aslinya

2.1.2 Teori Karakteristik

2.1.2.1 Pengertian Karakteristik

Menurut KBBI, karakteristik ialah ciri-ciri, sifat atau tanda yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu hal. Selain itu, karakteristik juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi pembeda antara satu hal dengan hal lainnya.

1. Karakteristik individu

Karakteristik merupakan sifat atau keunikan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal keyakinan, tindakan, maupun perasaannya. Sejumlah teori telah berkembang untuk menguraikan aspek-aspek penting dari karakter manusia. Secara umum, karakteristik mencakup atribut individu yang meliputi aspek demografis seperti usia dan jenis kelamin, serta aspek sosial seperti jenis pekerjaan, ras, status ekonomi, tingkat pendidikan dan lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Normariati Silaban (2018), keberagaman karakter individu menciptakan pola interaksi yang bervariasi dalam konteks kinerja organisasi. Setiap orang menunjukkan perilaku yang berbeda, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan masing-masing yang tidak seragam.

Menurut Purnama Sari (2021), setiap individu memiliki ciri khas masing-masing yang mencakup kemampuan, keyakinan pribadi, harapan, kebutuhan, serta pengalaman masa lalu. Tidak semua orang memiliki keahlian yang sama dalam bidang manajemen, namun mereka bisa memiliki keunggulan dalam bidang lainnya. Tingkat potensi dalam berbagai bidang pun berbeda pada tiap individu, dan potensi yang paling menonjol biasanya disebut sebagai bakat. Sementara itu, Subyanto Ibrahim (2019) menyatakan bahwa karakteristik individu merupakan sikap dan nilai-

nilai yang dianut seseorang, yang memengaruhi dirinya dalam meraih tujuan sesuai dengan keinginan. Hal ini menjadi pembeda yang unik bagi setiap orang karena sesuai dengan prinsip, konsep, dan arah hidup yang mereka yakini.

Dalam pandangan Lawrence Green yang dikutip oleh Natoatmodjo (2021), perilaku manusia terbentuk dan dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, terdapat faktor predisposisi yang mencakup aspek-aspek seperti tingkat pengetahuan, sikap, nilai yang dianut, keyakinan, serta karakteristik sosiodemografis. Karakteristik ini meliputi usia, jenis kelamin, latar belakang ekonomi, jenjang pendidikan, dan faktor serupa lainnya. Kedua, faktor pemungkin yang mencakup tersedianya fasilitas pendukung serta keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan suatu tindakan. Ketiga, faktor penguat yang terlihat dari sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh tenaga kesehatan serta keberadaan kebijakan atau regulasi, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat memperkuat atau melemahkan perilaku individu.

1. Pendidikan

Secara umum, pendidikan bisa dipahami dengan sebuah proses yang dirancang dengan sengaja untuk memberikan pengaruh terhadap individu, kelompok, atau masyarakat agar mereka bertindak sesuai dengan harapan pihak yang memberikan pendidikan Notoatmodjo (2011). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan formal yang diselenggarakan melalui jalur sekolah terbagi menjadi beberapa jenjang, yakni pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar (SD, MI, SMP, MTs) adalah pendidikan paling dasar yang menjadi penunjang untuk melanjutkan pendidikan ke-jenjang menengah. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar dan meliputi pendidikan MA, SMA, MAK, SMK atau program lainnya yang setara. Sementara untuk pendidikan tinggi mengikuti setelah pendidikan menengah dan meliputi program diploma, sarjana, magister, serta doktor yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi.

2. Pengetahuan

Menurut Plato, seorang filsuf Yunani Kuno, menyatakan bahwa pengetahuan adalah “keyakinan yang benar yang disertai dengan alasan”. Dalam pandangannya, pengetahuan berbeda dengan opini atau kepercayaan yang keliru, karena pengetahuan selalu didasarkan pada dasar yang kuat dan rasional. Menurut Aristoteles, menyatakan bahwa pengetahuan adalah pencapaian yang didasarkan pada pengalaman indrawi yang dianalisis melalui logika. Menurutnya, pengetahuan terdiri dari dua jenis: pengetahuan teoritis (seperti matematika dan filsafat) dan pengetahuan praktis (seperti etika dan politik).

3. Umur

Umur seseorang berperan dalam menentukan bagaimana ia menanggapi dan menyelesaikan masalah. Individu yang lebih muda cenderung menunjukkan sikap apatis, kecenderungan untuk mengisolasi diri secara sosial, serta lebih sering melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena mereka belum mendapatkan pengalaman hidup yang berharga. (Basavanthappa, BT., 2011).

4. Jenis Kelamin

Semua jenis kelamin berisiko mendapatkan diagnosis gangguan mental, namun perempuan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi mengalami gangguan mental yang bersifat emosional. Hal ini dikarenakan, hormon pada perempuan yang terus berubah sesuai dengan situasi atau kondisi. Selain itu, perempuan merupakan makhluk yang perasa, sehingga mereka lebih mengutamakan aspek emosional dibandingkan rasional. (Marini, 2008)

5. pekerjaan

Jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang dapat mencerminkan berbagai aspek penting seperti tingkat pendapatan, status sosial, jenjang pendidikan, serta posisi sosial ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, pekerjaan juga berkaitan dengan risiko cedera atau gangguan kesehatan dalam kelompok populasi tertentu. Pekerjaan bahkan dapat menjadi faktor penentu utama terhadap paparan risiko spesifik di bidang kerja tertentu, sekaligus menjadi indikator kondisi kesehatan

dan lingkungan kerja dari suatu kelompok populasi (Widya Astuti).

6. Pendapatan Keluarga

Menurut Djola (2012), pendapatan diklasifikasikan menjadi dua tingkat, yaitu rendah dan tinggi, dengan acuan pada Upah Minimum Pekerjaan (UMP). Pendapatan yang berada di bawah UMP digolongkan sebagai pendapatan rendah, sedangkan yang melebihi UMP masuk dalam kategori pendapatan tinggi. Semakin besar pendapatan yang dimiliki oleh sebuah keluarga, maka cenderung semakin baik pula tingkat kesehatan keluarga tersebut.

2.1.2.2 Karakteristik Usaha

Usaha laundry umumnya dikelola langsung oleh pemiliknya, seperti halnya dengan jenis usaha perorangan lainnya. Berdasarkan pada hasil pengamatan di lapangan, para pemilik usaha laundry terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan usahanya, dengan bantuan beberapa karyawan untuk mendukung operasional harian. Djoko Santoso (2020) menjelaskan bahwa karakteristik usaha mencakup latar belakang pendirian usaha, sumber permodalan, dan skala usahanya. Seorang wirausahawan yang memulai usahanya atas dasar inisiatif pribadi cenderung memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya melanjutkan usaha keluarga. Memulai usaha dari awal memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengalami proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kompetensinya dalam berwirausaha.

Dalam pengelolaannya, para pemilik usaha laundry menyediakan pelayanan kepada konsumennya baik dalam segi harga maupun fasilitas untuk menarik minat konsumen. Usaha laundry dijalankan dengan berbagai macam penawaran seperti penyediaan jasa antar jemput gratis, laundry yang bisa selesai dalam sehari serta mencuci bersih dan wangi, hal ini dilakukan pemilik usaha laundry untuk menarik lebih banyak perhatian konsumen. Berdasarkan perolehan data, mayoritas konsumen usaha laundry adalah seorang pekerja dan juga mahasiswa yang berasal dari luar daerah atau daerah setempat. Hal tersebut dikarenakan di Kec. Jambi Luar Kota tepatnya di Desa Mendalo, banyak mahasiswa perantauan yang sengaja datang ke

kota ini untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Selain itu, mahasiswa ini juga seringkali mengalami kesibukan yang padat selama kuliah sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mencuci baju.

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Terdapat beberapa variabel yang dipergunakan didalam studi ini yang mampu memengaruhi pendapatan para pelaku usaha laundry seperti dibawah ini:

1. Modal

Istilah modal berasal dari kata Tamil “mutal” yang berarti “dasar”, “tumpuan”, “bagian bawah”, atau “ujung”. Kata ini memiliki berbagai makna yang terkait dengan bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi. Menurut ardiprawiro (2015) pada permulaannya, modal diartikan sama dengan physical oriented yang diartikan lebih luas dengan hasil produksi yang disisihkan beberapa untuk kembali melaksanakan produksi lebih lanjut. Seiring dengan perkembangan waktu, konsep modal mulai meluas menjadi lebih bersifat non-fisik, dimana penekanan diberikan kepada daya beli, atau kekuatan untuk memakai barang modal tersebut. namun, dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat dari beberapa ahli terkait definisi yang tepat.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja ialah seorang individu yang berada didalam usia produktif yang siap untuk bekerja, termasuk mereka yang sedang bekerja, bersekolah atau mengurus rumah tangga. Tenaga kerja mencakup seluruh individu yang rela atau siap untuk bekerja, termasuk juga mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena kurangnya kesempatan kerja.

Sementara itu, Sukirno (2007) menyatakan bahwa tenaga kerja tidak hanya merujuk pada jumlah buruh dalam suatu perekonomian, tetapi juga mencakup keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya, yakni:

- a. Tenaga kerja tidak terampil ialah kelompok pekerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau tidak menempuh pendidikan formal, serta belum memiliki keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan tertentu.
- b. Tenaga kerja dengan keterampilan merujuk pada individu yang telah menguasai keahlian tertentu melalui pelatihan atau pengalaman praktik seperti teknik kendaraan dan tukang kayu.
- c. Tenaga kerja profesional atau berpendidikan ialah individu yang telah menyelesaikan pendidikan formal secara menyeluruh dan memiliki keahlian spesifik dibidangnya seperti insinyur, dan dokter.

3. Lokasi Usaha

Teori lokasi merupakan cabang ilmu yang mempelajari susunan spasial dari aktivitas ekonomi, serta menganalisis distribusi geografis sumber daya potensial dan keterkaitannya atau dampaknya terhadap berbagai aktivitas lainnya, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. (Pramesti, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), golongan pendapatan penduduk dibedakan kedalam 4 kategori, yakni :

1. Golongan pendapatan sangat tinggi, dengan rerata pendapatan diatas Rp3.500.000 per bulan.
2. Golongan pendapatan tinggi, dengan rerata pendapatan diantara Rp2.500.000-Rp3.500.000 per bulan.
3. Golongan pendapatan sedang, dengan rerata pendapatan diantara Rp1.500.000-Rp2.500.000 per bulan.
4. Kelompok berpendapatan rendah, dengan rerata pendapatan dibawah Rp1.500.000.

Pendapatan rumah tangga ialah pendapatan yang diterima oleh anggota keluarga dan digunakan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Besarnya pendapatan seseorang dapat mengalami perubahan seiring waktu, tergantung pada kapasitas atau kemampuan yang dimilikinya. Perubahan tersebut juga memengaruhi pola pengeluaran, terutama dalam hal konsumsi barang. Oleh

karena itu, pendapatan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan tingkat konsumsi baik individu maupun masyarakat. Menurut penjelasan Rahardja dan Manurung yang dikutip dalam Qolbina (2017), sumber utama pendapatan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pendapatan dari gaji atau upah, yaitu kompensasi atas jasa tenaga kerja yang diberikan. Besarnya pendapatan ini dipengaruhi oleh produktivitas individu, seperti tingkat keterampilan, kualitas sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan kerja.
2. Pendapatan dari aset produktif, yakni hasil dari pemanfaatan berbagai aset, baik finansial seperti tabungan, saham, dan modal, maupun non-finansial seperti rumah, tanah, dan bangunan
3. Pendapatan dari transfer pemerintah, berupa bantuan atau dukungan yang diberikan tanpa imbal jasa langsung, misalnya dalam bentuk subsidi, tunjangan, atau program jaminan sosial.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Friedman dalam Qolbina (2017), pendapatan yang diterima oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni pendapatan permanen (*permanent income*) dan pendapatan sementara (*transitory income*). Pendapatan permanen merujuk pada penghasilan yang bersifat tetap dan berkelanjutan dalam jangka panjang, sementara pendapatan sementara merupakan penghasilan yang bersifat tidak tetap dan hanya berlangsung dalam waktu tertentu.

Menurut Budiono dalam Qolbina (2017), tingkat pendapatan dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya jumlah faktor produksi yang dimiliki, nilai per unit dari tiap faktor produksi, serta harga yang terbentuk berdasarkan kekuatan permintaan pasar. Sementara itu, Arifini (2013) menjelaskan bahwa pendapatan usaha laundry didapatkan melalui total penerimaan yang dikurangi dengan total pembiayaan yang dikeluarkan. Untuk menghitungnya, dikenal dua pendekatan yang biasa digunakan.

1. *Income Approach* (pendekatan pendapatan)

Pendekatan Pendapatan (Income Approach) merupakan salah satu cara untuk menghitung pendapatan dengan membedakan antara pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh dari hasil produksi dalam suatu periode tertentu, yang diperoleh dengan mengalikan jumlah produk yang dihasilkan dengan harga satuan dari produk tersebut. Dengan kata lain, pendapatan kotor mencerminkan seluruh pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan proses produksi. Pendapatan kotor dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TR = Y \cdot P_y$$

Keterangan:

TR : Total revenue (pendapatan kotor total)

Y : Jumlah produksi

P_y : harga persatuan produk

Pendapatan bersih pada usaha laundry dapat didefinisikan sebagai selisih antara total nilai yang didapatkan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama satu periode produksi.

$$I = TR - TC \text{ (eksplisit)}$$

Keterangan :

I : Pendapatan Bersih

TR : Pendapatan Kotor

TC : Biaya Total

2. Profit Approach (Pendekatan Produksi)

Keuntungan adalah perbedaan antara total nilai hasil produksi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan, baik biaya yang nyata (total biaya eksplisit) maupun biaya yang tidak tampak secara langsung (total biaya implisit). Secara matematis, keuntungan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$II = TR - TC$$

Keterangan:

II : Keuntungan

TR : Pendapatan Kotor

TC : Total biaya (eksplisit + implisit)

Menurut Handoko (2013), dalam menjalankan bisnis laundry, seorang pelaku usaha akan mengeluarkan sejumlah pengeluaran dan memperoleh pemasukan. Pengeluaran yang dimaksud mencakup keseluruhan nilai dari sumber daya yang digunakan dan habis selama proses operasional berlangsung, namun tidak termasuk tenaga kerja dari anggota keluarga pemilik usaha. Secara garis besar, biaya dalam usaha laundry dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yakni:

1. Biaya Tetap ($FC = \text{fixed cost}$)

Biaya tetap adalah jenis biaya yang tidak terpengaruh oleh naik turunnya volume produksi atau aktivitas usaha. Artinya, meskipun jumlah layanan atau barang yang dihasilkan mengalami perubahan, besaran biaya ini tetap sama. Dalam konteks bisnis laundry, biaya tetap dapat mencakup pengeluaran seperti biaya sewa tempat usaha, pembelian atau penyusutan peralatan laundry, serta konsumsi air dan listrik yang tidak berubah secara signifikan.

2. Biaya variabel ($VC = \text{variable cost}$)

Biaya variabel adalah jenis pengeluaran yang besarnya menyesuaikan dengan naik turunnya volume produksi atau aktivitas operasional dalam suatu usaha. Berbeda dengan biaya tetap yang tidak terpengaruh oleh volume produksi, biaya variabel akan meningkat seiring dengan peningkatan produksi dan sebaliknya, akan berkurang apabila jumlah produksi berkurang. Contoh biaya variabel yaitu, biaya tenaga kerja, dan input (detergen, pewangi, plastik).

Menurut Handoko (2013:61) persamaan untuk menghitung biaya usaha laundry ialah:

$$TC = FC + VC$$

Keterangan :

TC : Biaya Total Usaha Laundry

FC : Biaya Tetap

VC : Biaya Variabel

2.1.4 Konsep Penyusutan

1. Defenisi Penyusutan

Salah satu aspek penting dalam akuntansi aset tetap adalah proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap tersebut ke dalam kegiatan operasional perusahaan setiap periode akuntansi. Proses ini dikenal dengan istilah *penyusutan*, yang didasarkan pada nilai perolehan, taksiran umur ekonomis, serta nilai sisa dari aset tetap yang bersangkutan (Adolph, 2016).

Hartati et al. (2023) menjelaskan bahwa penyusutan merupakan proses distribusi biaya perolehan aset tetap ke dalam beban operasional atau produksi sebagai akibat dari pemanfaatan aset tersebut dalam aktivitas bisnis. Aset tetap sendiri merupakan bentuk kekayaan perusahaan yang berwujud, memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun, dan diperoleh untuk menunjang aktivitas operasional, bukan untuk dijual kembali. Umumnya, perusahaan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk investasi pada aset tetap seperti lahan, bangunan, kendaraan, mesin, maupun peralatan lainnya.

Penyusutan berfungsi untuk membagi biaya aset tetap selama periode penggunaan tertentu. Dengan kata lain, nilai awal dari aset seperti gedung, mesin produksi, atau peralatan kerja dikonversi menjadi beban secara bertahap selama umur manfaat aset tersebut (Latipatul Hamdah & Pratama, 2023). Menurut Hery (2015) mengungkapkan bahwa penyusutan adalah proses alokasi biaya aset secara periodik dan sistematis selama periode-periode tertentu yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Sementara itu Diana Anastasia dan Lilis Setiawati (2017) mendefinisikan penyusutan sebagai alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan suatu aset sepanjang masa manfaatnya.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusutan adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset tetap, seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan lainnya, selama periode manfaat ekonomisnya, yang dicatat dalam setiap periode akuntansi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan

Besarnya beban penyusutan yang dicatat dalam setiap periode akuntansi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah estimasi umur ekonomis aset tetap. Semakin panjang masa manfaat suatu aset, maka semakin kecil nilai penyusutan yang dibebankan setiap periodenya. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi perhitungan dan pengalokasian penyusutan, antara lain:

a. Biaya Perolehan

Total biaya akuisisi suatu aset merupakan elemen penting dalam menentukan besarnya penyusutan. Nilai penyusutan dihitung dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap siap dioperasikan. Biaya tersebut mencakup harga beli, ongkos pengiriman atau transportasi, biaya instalasi, serta bea impor yang dikenakan.

b. Taksiran Umur Kegunaan

Perkiraan masa manfaat suatu aset dipengaruhi oleh metode perawatannya serta kebijakan yang diterapkan dalam perbaikan.

c. Nilai Sisa (Residu)

Dengan demikian, penentuan nilai sisa sangat bergantung pada kebijakan penggunaan aset oleh SKPD, termasuk sejauh mana aset dimanfaatkan dan kapan waktu pengantiannya. Faktor-faktor seperti kondisi fisik aset, perkembangan teknologi, serta permintaan pasar juga turut memengaruhi besar kecilnya nilai sisa yang dapat direalisasikan. Oleh karena itu, estimasi nilai sisa harus dilakukan secara cermat agar penyusutan yang dihitung dapat mencerminkan nilai ekonomi aset secara lebih akurat.

d. Pola Pemakaian

Besarnya penyusutan periodik yang dibebankan pada setiap periode seharusnya mencerminkan hubungan yang proporsional antara biaya perolehan aset dan pendapatan yang dihasilkan selama masa manfaatnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa beban penyusutan dialokasikan secara adil ke periode-periode yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan aset tersebut, sehingga laporan

keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan dan efisiensi penggunaan aset.

3. Metode Perhitungan Penyusutan

Terdapat beberapa metode/teknik yang dipergunakan untuk menghitung beban penyusutan periodik, salah satunya yaitu dengan mempertimbangkan kondisi yang memperoleh aktiva tersebut. Menurut Bridwan (2014), metode-metode penyusutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut, beserta penjelasannya masing-masing:

a. Metode Garis Lurus

Pendekatan ini termasuk metode yang paling mudah dipahami serta lazim dipergunakan didalam proses perhitungan penyusutan. Pada metode ini, beban penyusutan yang dibebankan pada tiap periode cenderung tetap, kecuali jika terdapat penyesuaian tertentu.

$$\text{Penyusutan/tahun} = (\text{HP} - \text{NS}) / n$$

Keterangan :

HP = Harga Perolehan

NS = Nilai sisa

n = Umur Ekonomis

Perhitungan penyusutan dengan cara garis lurus ini didasarkan pada anggapan-anggapan berikut:

1. Manfaat ekonomi dari suatu aset cenderung mengalami penurunan secara proporsional di setiap periode.
2. Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perbaikan umumnya bersifat konstan dari satu periode ke periode berikutnya.
3. Kegunaan ekonomi berkurang karena lewatnya waktu;
4. Penggunaan(kapasitas)aktiva tiap-tiap periode relatif tetap;

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, metode penyusutan garis lurus dianggap paling sesuai untuk diterapkan dalam menghitung penyusutan aset seperti bangunan dan peralatan lainnya. Melalui pendekatan ini, beban penyusutan yang dibebankan pada setiap periode akan memiliki jumlah yang tetap dan konsisten sepanjang umur

manfaat aset tersebut.

b. Metode Jumlah Angka Tahunan (*Sum of Years Digit Method*)

Dalam metode ini besarnya penyusutan tiap tahun selalu menurun, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa semakin tua suatu aktiva maka semakin kecil hasilnya, sehingga penyusutannya pun semakin menurun.

Untuk menentukan jumlah angka tahun bisa dipergunakan persamaan dibawah ini:

$$\text{Jumlah angka tahun} = ((n+1))/2$$

Keterangan:

n = Umur Ekonomis

c. Metode Double Declining Balance

Dalam metode ini, beban penyusutan setiap periode dihitung dengan mengalikan tarif tetap dengan nilai buku aset yang tersisa. Karena nilai buku aset akan terus menurun setiap tahunnya, maka tarif penyusutan ditentukan menggunakan rumus tertentu, yaitu sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penyusutan/tahun} = 1 - \sqrt[n]{(NS/HP)}$$

Keterangan:

N = Umur Ekonomis

NS = Nilai Sisa

HP = Harga Perolehan

d. Metode Jam Jasa (*Services Hours Method*)

Metode ini berlandaskan pada asumsi bahwa suatu aset, khususnya mesin, akan mengalami penurunan kondisi lebih cepat apabila dioperasikan secara penuh (*full time*) dibandingkan dengan penggunaan yang tidak maksimal (*part time*). Dalam pendekatan ini, penyusutan dihitung berdasarkan jumlah satuan hasil produksi, dengan rumus per unit sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan/jam} = (HP - NS) / n$$

$$\text{Penyusutan/periode} = \text{Jumlah jam/periode} \times \text{penyusutan/jam}$$

Keterangan:

HP = Harga Perolehan

NS = Nilai sisa

n = Taksiran Jam Jasa

Karena penyusutan dihitung berdasarkan jumlah jam penggunaan, metode ini sangat sesuai diterapkan pada kendaraan, dengan asumsi bahwa keausan lebih disebabkan oleh intensitas pemakaian daripada faktor usia waktu.

e. Pendekatan Penyusutan Berdasarkan Output Produksi

Metode ini menilai umur ekonomis suatu aset dengan mengacu pada total unit produksi yang dihasilkan selama masa penggunaannya. Oleh karena itu, beban penyusutan tiap periode akan berubah-ubah tergantung pada volume produksi yang dicapai. Penyusutan per unit dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan/unit} = (\text{HP} - \text{NS}) / (n)$$

$$\text{Penyusutan/periode} = \text{Jumlah Produksi/periode} \times \text{penyusutan/unit}$$

Keterangan :

HP = Harga Perolehan

NS = Nilai Sisa

n = Taksiran Hasil Produksi

Metode ini serupa dengan metode berdasarkan jam kerja, dan lebih tepat diterapkan pada aset yang output-nya dapat diukur secara kuantitatif, seperti mesin produksi. Beban penyusutan yang dihitung dengan metode hasil produksi dan jam jasa, jumlah setiap periode tergantung pada jumlah produksi atau jam kerja aktiva. Sehingga biaya penyusutan yang dihitung dengan cara ini mempunyai sifat variabel.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Masalah penelitian	Hasil penelitian
1.	Tri Sari, Yesi, 2012 Analisis Pendapatan	1. Rata-rata pendapatan dan laba usaha laundry	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

	Usaha Laundry Di Kecamatan Tampan Pekanbaru	di Kecamatan Tampan Pekanbaru. 2. Titik impas (Break Event Point, BEP) yang harus dicapai agar usaha laundry tidak mengalami kerugian. 3. Karakteristik pelanggan utama usaha laundry di Kecamatan Tampan Pekanbaru.	pendapatan Rata-rata usaha laundry di Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah Rp3.763.800 perbulan, laba bersih rata-rata mencapai Rp1.640.640 perbulan, Titik impas (BEP) dihitung berdasarkan volume cucian minimal 166 kg perhari dengan tarif minimal Rp2.149 per kg untuk menghindari kerugian, karekteristik mayoritas pelanggan 80% dari kalangan mahasiswa atau anak kos dan sebagian kecil 20% berasal dari kalangan masyarakat umum di sekitar Kecamatan Tampan Pekannaru.
2.	Andi Yusdi, Herman Callo, Supriadi Yusuf, 2024	1. Mengetahui Besarnya rata-rata pendapatan usaha jasa	Hasil penelitian Analisis pendapatan Usaha Jasa Laundry di

	Analisis Pendapatan Usaha Laundry di Kecamatan Mamuju.	laundry di Kecamatan Mamuju 2. Menganalisis apakah usaha laundry tersebut memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.	Kecamatan Mamuju menunjukkan pendapatan rata-rata mencapai Rp3.763.800, keuntungan usaha laundry dinyatakan dengan nilai R/C Ratio sebesar 1,2/setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan Rp1,2 pendapatan, dengan rata-rata produksi perhari adalah 50kg pakaian dengan harga jasa Rp6.000 per kg, serta pendapatan bersih harian sebesar Rp65.587.
3.	Sunarti Djoko, 2022 Analisis Pendapatan Bisnis Laundry Di Kota Ternate.	1. Menganalisis pendapatan bisnis Nhanda Laundry di Kota Ternate pada periode 2017-2021 2. Mengidentifikasi fluktuasi pendapatan bersih selama lima	Berdasarkan analisis penelitian bisnis laundry di Kota Ternate menunjukkan bahwa pendapatan bersih mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada

		tahun. tahun 2020 dan 2021 setelah penurunan pada tahun 2018 dan 2019, sumber pendapatan terbesar berasal dari layanan cuci dan setrika yang memberikan kontribusi tertinggi sebesar 20,55% dari total pendapatan, layanan setrika kilat berada di posisi kedua dengan kontribusi 13,48%, analisis biaya yang mencakup biaya tetap terdiri dari listrik, BBM, reparasi peralatan, dan gaji, biaya variabel terdiri dari penggunaan plastik, kantong kresek, dan alat tulis, biaya proses pencucian dan penyetrikaan menjadi komponen variabel terbesar.
--	--	---

4.	Osin Tompudong, 2014 Analisis Net Profit Margin Pada Usaha Laundry Di Kota Manado	1. Menganalisis rasio Net Profit Margin (NPM) sebagai indikator kinerja keuangan pada tiga usaha laundry di Kota Manado : Henny Laundry, Nila Clean Laundry, dan Revina Laundry. 2. Membandingkan kinerja ketiga usaha laundry berdasarkan rasio NPM pada tahun 2013.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Net Profit Margin (NPM): Henny Laundry memiliki NPM tertinggi dengan rentang 56%-63% yang menunjukkan kinerja laba bersih yang baik dan stabil, Nila clean Laundry cenderung lebih stabil tetapi mengalami fluktuasi karena naik turunnya pendapatan dengan nilai rata-rata sekitar 42%-56%, Revina Laundry menunjukkan tren peningkatan dengan nilai NPM berkisar 41%-58%, sedangkan kinerja NPM dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan bersih dan efisiensi biaya operasional.
5.	Wyke Gualiani P.N,	1. Menganalisis	Berdasarkan hasil

	Wagini, Rina Trisna Yanti, 2022 Analisis Pendapatan Usaha Jasa Laundry Pondok Setrika Bengkulu Selatan	pendapatan rata-rata, pendapatan bersih, dan break event point (BEP) baik dalam unit maupun dalam rupiah dari usaha laundry pondok setrika di Bengkulu Selatan pada periode 2016-2020. 2. Menilai apakah usaha ini mampu mencapai BEP setiap tahunnya.	penelitian usaha laundry pondok setrika menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata dari tahun ke tahun meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun tertentu, usaha yang telah berhasil mencapai BEP secara konsisten selama lima tahun, serta pendapatan terbesar berasal dari layanan cuci setrika.
6.	Fajar Ramadhan, Sri Adella Fitri, Hasibuan Mas Zulita, Haura Nadira, 2023 Penerapan Akuntansi: Tinjauan Pada Usaha Jasa Laundry	1. Menganalisis Penerapan Akuntansi pada usaha laundry, Khususnya Laundry Berkah di Batusangkar 2. Mengidentifikasi masalah yang sering dihadapi dalam menerapkan sistem Pencatatan akuntansi.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat hasil bahwa sebagian besar usaha laundry di Batusangkar, termasuk Laundry Berkah belum menerapkan pencatatan keuangan yang sistematis, hal ini menyebabkan

			usaha tidak dapat mengetahui kondisi keuangan mereka, baik laba maupun rugi.
7.	Yuli Santika, Muhliyanto, Bela, Mirdawati, Matsna Marwan Addin, 2023 Analisis Break Event Point (BEP) pada Khair Laundry di Kota Pontianak	1. Menentukan titik impas (Break Event Point) Khair Laundry sebagai Indikator untuk mengevaluasi kelayakan dan profitabilitas usaha 2. Menganalisis jumlah minimal layanan yang harus dihasilkan agar usaha tidak mengalami kerugian.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Khair Laundry harus mencuci pakaian sebanyak 400 kg untuk mencapai BEP. Artinya apabila khair laundry dapat memperoleh pakaian sebanyak 400 kg dalam sebulan maka tidak akan mengalami keuntungan dan kerugian. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti disimpulkan bahwa khair laundry telah menerapkan prinsip BEP dengan baik.
8.	Ninda Nur Fauziah, Wehdawati, 2020 Revenue Analysis	1. Bagaimana analisis pendapatan penjualan pada usaha Angel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Break Event Point

	Using Break Event Point in Angel Laundry	laundry dikualifikasi dengan Break Event Point 2. Menganalisis pendapatan penjualan pada usaha Angel laundry di kuala Pembuang dengan menggunakan break event point melalui pendekatan rumus matematis dan grafik.	dalam unit sebesar 179,29 kg perbulannya. Selain itu, usaha angel laundry sudah tepat dalam menentukan harga jualnya sebesar Rp6.000 per kg nya jika dilihat dari nilai break event point, maka untuk mendapatkan keuntungan usaha angel laundry harus mampu mendapatkan penjualan diatas dari Rp1.070.772. pada bulan mei 2019 usaha angel laundry mampu menjual jasa laundry sebanyak 830 kg. berdasarkan hasil analisis di dapatkan hasil penjualan pada bulan mei 2019 sebesar Rp 4.980.000 dan hasil break event point dalam rupiah
--	--	--	---

			sebesar Rp 1.070.722 artinya usaha angel laundry mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp 3.090.228 atau sebesar 78,49 %
9.	Made Wijana, I. G. A. K. Chatur Adhi W, B. V. S. Boli, 2023 Analisa Usaha Laundry (Hoop Laundry) Di Kota Mataram Dengan Metode Break Event Point (BEP)	1. Analisis pendapatan Hoop Laundry menggunakan titik impas berak event Point (BEP). 2. menganalisis pendapatan rata-rata Hoop Laundry dalam satu bulan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisa yang dilakukan di kota mataram dengan metode break event point memberikan hasil yaitu jumlah rata-rata kg laundry perbulan yang dihasilkan oleh Hoop laundry adalah 1.705,52 kg. biaya tetap (FC) Rp 25.510.500 dana biaya tidak tetap (VC) Rp 61.828.852,5. Dari harga laundry per kg (p) yaitu Rp 6.000 jumlah kilo yang dihasilkan untuk

			mencapai break event point adalah berjumlah 12.984 kg laundry. Waktu untuk mencapai break event point adalah pada 7,6 bulan dengan total biaya pengeluaran (TC) sama dengan total pendapatan (TR) yaitu Rp 77.902.498. Usaha Hoop laundry ini dinyatakan layak beroperasi karena dapat mencapai break event point kurang dari satu tahun.
10.	Popi Novyanti, 2019 Analisis Pendapatan Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Syiah Kuala (Kajian Perspektif Ekonomi Islam)	1. Berapa besar pendapatan rata-rata usaha jasa laundry di Kecamatan Syiah Kuala 2. Apakah usaha sektor jasa laundry di Kecamatan Syiah Kuala Menguntungkan Pengusaha Laundry 3. Apakah jasa usaha laundry Di Kecamatan	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan kotor rata-rata di Kecamatan Syiah Kuala adalah Rp 297.000 per hari, setelah dikurangi biaya operasional rata-rata Rp 216.960 per hari, penghasilan

		Syiah Kuala sudah berdasarkan prinsip syariah.	bersih rata-rata mencapai Rp 252.280 per hari, keuntungan dengan menggunakan Rasio R/C (Revenue to Cost Ratio) sebesar 1,2, artinya setiap Rp 1 yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan Rp 1,2, ini menunjukkan usaha laundry di wilayah tersebut cukup menguntungkan, sedangkan untuk proses pencucian menggunakan air muthlag, yaitu air yang berasal dari sumber yang halal seperti tanah atau sumur, dengan volume minimal dua quallah (234,375 liter), pencucian mengikuti prinsip kesucian sesuai syariat islam.
11.	Jian Su, GuangMing,	1. Menganalisis	Dari hasil penelitian

	2013 The Chinese Urban and Rural Per Capita Income and Trend Analysis	pendapatan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. 2. mengidentifikasi implikasi sosial dan ekonomi yang menjadi ketidakstabilan sosial dan hambatannya terhadap keadilan. 3. Strategi dalam meningkatkan pendapatan penduduk, khususnya pedesaan dalam konteks harga komoditas.	tersebut menunjukkan bahwa pendapatan perkapita dikawasan perkotaan diproyeksikan menembus 30 ribu yuan pertahun pada tahun 2015, tetapi tetap dibawah rata-rata global, pendapatan bersih perkapita dikawasan pedesaan diprediksi melampaui 10 ribu yuan pada tahun 2014 dimana setara dengan pendapatan perkotaan delapan tahun sebelumnya, kesenjangan pendapatan dengan rasio pendapatan perkotaan terhadap pedesaan menunjukan tren penurunan, tetapi tetap signifikan dengan rasio berkisar antara ,11 hingga 2,61
--	---	---	---

			dalam lima tahun kedepan, diperlukannya upaya besar untuk mempersempit kesenjangan pendapatan, termasuk peningkatan kebijakan pendukung untuk pedesaan, fokus pada peningkatan produktivitas disektor pertanian dan diversifikasi sumber pendapatan dikawasan pedesaan.
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang saya buat menemukan beberapa referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi penelitian terdahulu sangat penting sebagai acuan yang membantu peneliti dalam merumuskan asumsi dasar, untuk mengembangkan “Analisis pendapatan dan Sumbangan usaha jasa laundry Terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi (Studi kasus di Desa Mendalo Indah)”.

Penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penulisan dengan judul Analisis Pendapatan Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Tampan Pekanbaru hanya memfokuskan pada rata-rata pendapatan usaha laundry serta profil pelanggan utama usaha laundry, dimana rata-rata pendapatan usaha laundry di Kecamatan Tampan

Pekanbaru sebesar Rp3.763.800 perbulan, sedangkan untuk karakteristik hanya berfokus pada pelanggan utama saja yaitu mayoritas pelanggan 80% dari kalangan mahasiswa atau anak kos atau sebagian kecil 20% berasal dari kalangan masyarakat umum.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir biasanya juga disebut kerangka konseptual. Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau di rumuskan (JASMINE, 2014). Kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang menggambarkan tata urutan sistematis dari isi yang akan disusun. Dari definisi di tersebut kerangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Usaha laundry adalah perusahaan yang bergerak di sektor laundry, pelayanan jasa laundry merupakan bisnis yang berkaitan dengan mencuci pakaian (Damiri Manurung et al., 2024). Sektor jasa ini diusahakan oleh pengusaha dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang sibuk dan memperoleh keuntungan dengan modal usaha yang tidak terlalu besar. Dalam melakukan usaha (pelayanan) ini maka menimbulkan input yaitu penerimaan dengan menggunakan alat analisis: biaya usaha laundry dan pendapatan laundry.



2.1 Kerangka Berfikir